

**PENGUATAN SADAR GENDER PADA ANGGOTA PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA PANYIRAPAN
KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG**

***STRENGTHENING GENDER AWARENESS IN FAMILY EMPOWERMENT AND
WELFARE (PKK) MEMBERS IN PANYIRAPAN VILLAGE, BAROS DISTRICT,
SERANG REGENCY***

¹Agisthia Lestari, ²Efriza, ³Fikri Habibi, ⁴Dini Izzati Maulani

^{1,2,3,4}Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pamulang

email : ¹agisthialestari10103@unpam.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mengenai sadar gender kepada anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Kegiatan ini anggota tidak hanya mendapatkan pemahaman soal apa itu gender tetapi diajak untuk memahami pentingnya kesetaraan gender karena berkaitan erat dengan perempuan dan kerja-kerja domestik yang erat kaitannya dengan hidup perempuan. Pada masyarakat dengan sistem patriarkal seperti di Indonesia, perempuan digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk berperan di semua sektor, seperti berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan dan berpenghasilan. Namun di lain sisi, muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan 'kodrat'-nya sebagai perempuan yang bekerja pada ranah domestik atau urusan rumah tangga seperti pekerjaan mencuci dan memasak. Pembiasaan makna ini kemudian menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan, sehingga perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, kekerasan berbasis gender dan diskriminasi, serta ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi ini kemudian mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi langsung dengan mendatangi lokasi pengabdian untuk memperoleh data, menggali dan mengidentifikasi masalah, dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan masyarakat maupun aparat desa Panyirapan dengan cara ceramah/pemberian informasi, dan pelatihan. Tim pengabdian masyarakat akan terbuka jika anggota PKK berkonsultasi untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang kerap dialami oleh perempuan dan bagaimana cara mencegahnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain diharapkan dapat: memberikan pengetahuan kepada anggota PKK mengenai pentingnya sadar gender yang akan membangun kesetaraan gender di dalam masyarakat desa Panyirapan. Karena dengan meningkatnya kesetaraan gender akan dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh perempuan tetapi masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Gender, Perempuan, Kesetaraan Gender, PKK, Patriarkal

ABSTRACT

The purpose of this activity is to provide an understanding of gender awareness to members of the Family Empowerment and Welfare (PKK) in Panyirapan Village, Baros District, Serang Regency. In this activity, members not only gain an understanding of what gender is but are invited to understand the importance of gender equality because it is closely related to women and domestic work that is closely related to women's lives. In a society with a patriarchal system like in Indonesia, women are depicted as humans who must live in a dilemma. On the one hand, women are required to play a role in all sectors, such as being highly educated and having a job and income. However, on the other hand, there are demands that women not forget their 'nature' as women who work in the domestic sphere or household chores such as washing and cooking. This refraction of meaning then places women in a very vulnerable position, so that women experience stigmatization, marginalization, gender-based violence and discrimination, as well as social, economic, and political inequality. This condition then affects the level of community welfare in an area. The implementation of this activity was carried out using the direct observation method by visiting the service location to obtain data, explore and identify problems, and interviews. Interviews were conducted with members of the Family Empowerment and Welfare (PKK) and the community as well as Panyirapan

village officials by means of lectures/information provision, and training. The community service team will be open if PKK members consult to find solutions to problems often experienced by women and how to prevent them. The results of these activities are expected to include: providing knowledge to PKK members about the importance of gender awareness which will build gender equality in the Panyirapan village community. Because by increasing gender equality, the benefits will be felt not only by women but also by society as a whole.

Keywords: Gender, Women, Gender Equality, PKK, Patriarchal

I. PENDAHULUAN

Pada masyarakat dengan sistem patriarkal seperti di Indonesia, perempuan digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk berperan di semua sektor, seperti berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan dan berpenghasilan. Namun di lain sisi muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan 'kodrat'-nya sebagai perempuan yang bekerja pada ranah domestik atau urusan rumah tangga seperti pekerjaan mencuci dan memasak. Tuntutan tersebut membuat perempuan pada akhirnya memiliki beban kerja ganda. Peran perempuan yang dikonstruksi masyarakat oleh sosial-budaya dalam istilah kodrat tersebut, dibiarkan maknanya menjadi suatu yang menempel pada perempuan dan menjadi citra diri perempuan. Peran perempuan dalam masyarakat terus berkembang, namun ketimpangan gender masih menjadi penghambat utama (Aisy & Aisy, 2023). Ketidakadilan ini bukan hanya mempengaruhi perempuan secara individual, tetapi juga berdampak pada keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Disisi lain, akibat perubahan sosial akibat pembangunan dan perkembangan teknologi yang memicu tingkat persaingan individu semakin ketat mengakibatkan mereka menjadi korbannya. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan sikap lain yang merendahkan harkat dan martabat perempuan semakin marak terjadi.

Di era kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya keadilan sosial saat ini, Definisi ketimpangan gender sederhana: suatu keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. Ketimpangan gender lebih sering terjadi pada jenis kelamin perempuan. Awal mula terjadinya ketimpangan gender pada perempuan disebabkan oleh rendahnya pendidikan (Trianton, 2009b). Hal ini berakar pada penindasan historis terhadap perempuan yang dimulai sejak awal peradaban di sebagian besar budaya, tetapi dampaknya masih terasa hingga saat ini. Dalam pendidikan,

tenaga kerja, dan seterusnya, perempuan di seluruh dunia terus menghadapi tantangan yang tidak hanya dihadapi oleh rekan pria karena mereka perempuan. Ketimpangan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia, masih terdapat gap capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah/provinsi.

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Kesenjangan gender dalam berbagai hal seperti ekonomi, kekuasaan, partisipasi politik, dan berbagai hal lainnya masih sering terjadi. Perempuan mengalami dampak yang paling signifikan dari kesenjangan gender diantaranya rentan terhadap pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencaharian, rentan menjadi korban tindak kekerasan dan menanggung beban ganda dalam rumah tangga. Perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat berbagai macam program khusus untuk perempuan yang dikenal dengan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG).

Selain itu, Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya disain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal. Rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari analisis gender. Pengarusutamaan gender juga menawarkan kerangka definisi dasar dari konsep-konsep kunci, mengusulkan prinsip-prinsip aksi dan menguraikan garis tanggung jawab dalam organisasi untuk mengarusutamakan gender di dalam seluruh programnya (UNDP, 2013).

Untuk Provinsi Banten sendiri, kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) telah diatur kedalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2010: Tentang Pengarusutamaan Gender
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2014: Tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2023: Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Sementara itu, Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi dalam pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab semua Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah termasuk Pemerintah Desa. Dalam pengarusutamaan gender, kita memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan PUG keterlibatan Pemerintah Desa menjadi sangat penting, karena Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah Desa perlu memastikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Desa telah mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Program dan kegiatan pembangunan Desa harus membuka akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, baik perempuan dan laki-laki, sehingga kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dapat tercapai. Dengan adanya Instruksi Presiden tersebut, maka mewajibkan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk mengarusutamakan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program.

Pengarusutamaan Gender dilakukan secara sistematis dan rasional, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pengarusutamaan Gender juga ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan.

Pengarusutamaan gender juga merupakan program yang lahir dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di dalam SDGs, kesetaraan gender merupakan Tujuan 5 dari 17 tujuan SDGs. Beberapa target dari Tujuan 5 SDGs adalah: *Pertama*, Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan. *Kedua*, Menghapuskan segala bentuk

kekerasan terhadap Perempuan. *Ketiga*, Menghapuskan praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat Perempuan. Melalui Panca Dharma, pemerintah telah membakukan konsep perempuan ke dalam lima peran, yaitu:

- 1) Perempuan adalah istri pendamping suami.
- 2) Perempuan adalah ibu pendidik dan pembina generasi muda.
- 3) Pengatur ekonomi rumah tangga.
- 4) Pencari nafkah tambahan.
- 5) Anggota masyarakat, terutama organisasi wanita, badan sosial, atau lainnya yang menyumbang pada masyarakat.

Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan wadah yang diberikan oleh pemerintah untuk perempuan. Pengelolaannya mulai dari lingkup terendah berupa satuan pokok kerja (pokja) hingga tingkat nasional dibawah naungan menteri dalam negeri. PKK juga dikelola oleh perempuan-perempuan akar rumput (*grass root*) yang menandakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKK juga dapat dimanfaatkan langsung oleh perempuan yang aktif tergabung dalam PKK diseluruh tingkatan. Keunggulan dari PKK adalah anggotanya adalah seluruh perempuan (istri) yang keluarganya terdaftar dalam kartu keluarga dan kependudukan. PKK tidak memberikan syarat anggota yang berpartisipasi memiliki jenjang pendidikan atau memiliki pengalaman.

II. METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah memberikan pemahaman mengenai gender dan pentingnya kesetaraan gender karena berkaitan erat dengan perempuan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). Peserta kegiatan terdiri dari aparat desa, anggota PKK, dan Masyarakat Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta. Materi FGD akan disampaikan oleh Tim Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berasal dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang. Dalam FGD, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan penjelasan mengenai tema kegiatan, yaitu pentingnya pemahaman mengenai kesetaraan gender bagi anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK). Adapun hal mendasar yang ditawarkan dalam realisasi pemecahan permasalahan adalah melalui 3 tahap, yaitu:

- 1) Tahap 1: Mengidentifikasi masalah perempuan (anggota PKK) yang menyebabkan rendahnya kesadaran gender dan peran mereka dalam pembangunan di wilayahnya
- 2) Tahap II: Menumbuhkan kesadaran gender dan merumuskan hal-hal yang dapat dilakukan dalam memperkuat peran serta anggota PKK
- 3) Tahap III: Pendampingan kegiatan yang bisa dilakukan oleh anggota PKK agar lebih terlibat aktif dalam pembangunan desa, terlihat pada gambar 1 berikut



Gambar 1. Pendampingan kegiatan PKM

Berdasarkan FGD yang telah dilakukan oleh Tim Dosen dari Prodi Ilmu Pemerintahan, terdapat Tahap I: Mengidentifikasi Masalah Perempuan. Beberapa masalah yang kerap dihadapi oleh perempuan di Desa Panyirapan, yaitu:

- 1) Partisipasi rendah

Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari keterwakilan perempuan yang rendah dalam musyawarah untuk menentukan kebijakan di desa seperti keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin diadakan setiap tahunnya.

- 2) Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, cukup sering terjadi di Desa Panyirapan namun sulit untuk diselesaikan karena masyarakat di sana masih menganggap permasalahan ini sebagai urusan pribadi yang tidak boleh ada campur tangan pihak lain.

3) Perkawinan anak

Perkawinan anak masih banyak terjadi karena budaya patriarki yang masih dominan di masyarakat. Perkawinan anak melibatkan Perempuan yang belum berumur 18 tahun dan biasanya terjadi kepada Perempuan yang berusia antara 14-17 tahun.

4) Keterbatasan akses

Perempuan masih tertinggal dalam aspek pembangunan, sehingga akses mereka terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya juga masih terbatas.

5) Peran Ganda

Hasil penelitian menunjukkan peran ganda pada ibu rumah yaitu sebagai ibu rumah tangga dan melayani kebutuhan keluarga termasuk pembinaan anak dan sebagai pencari nafkah. Sebetulnya peran ganda tidak selalu menimbulkan efek negatif, karena perekonomian suatu keluarga bisa meningkat ketika perempuan ikut bekerja.

6) Diskriminasi

Diskriminasi perempuan adalah tindakan yang membatasi, mengontrol, atau mengganggu hak-hak perempuan sehingga posisinya terpinggirkan. Diskriminasi terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan, kesenjangan upah antara lelaki dan perempuan.

Tahap II: Menumbuhkan Kesadaran Gender

Bagi masyarakat Desa Panyirapan, gender seringkali disalahpahami sebagai jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) sehingga hal inilah yang kemudian memicu banyak permasalahan, peserta PKM terlihat pada gambar 2 berikut



Gambar 2. Sesi foto bersama PKM dosen Ilmu Pemerintahan

Penyebutan jenis kelamin membuat persepsi masyarakat terhadap perempuan dilihat hanya dari faktor ketubuhan atau fungsi reproduksinya saja, bukan dari peran-peran sosialnya. Sebagai sebuah konstruksi sosial, gender adalah tentang memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan baik pria maupun wanita diperhitungkan. Menumbuhkan kesadaran gender juga bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana. Misalnya saja, memberikan kesadaran untuk tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, tidak membedakan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam suatu organisasi, dan tidak melakukan perundungan pada perempuan akibat melakukan pekerjaan kasar.

Tahap III: Pendampingan Kegiatan Perempuan

Setelah melakukan diskusi, Tim PKM melanjutkan kegiatan dengan tahap ketiga yaitu dengan melakukan pendampingan kegiatan yang bisa dilakukan oleh anggota PKK Desa Panyirapan agar mampu terlibat lebih aktif pada program-program pembangunan desa, misalnya saja:

- 1) Meningkatkan partisipasi anggota PKK dan perempuan Desa Panyirapan dalam kegiatan perencanaan pembangunan seperti Musrenbang di tingkat Desa.
- 2) Mendorong perempuan dan anggota PKK Desa Panyirapan untuk mengambil peran-peran yang lebih strategis dalam membuat perencanaan kegiatan, sehingga program-program pembangunan desa lebih memiliki perspektif gender. Karena selama ini, permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anggota PKK adalah mereka dilibatkan hanya untuk tugas-tugas domestik seperti penyedia konsumsi, dokumentasi, atau pendukung acara.
- 3) Mendorong pembentukan jaringan dan kelompok advokasi. Hal ini dimaksudkan agar perempuan memiliki daya dukung ketika menghadapi permasalahan seperti penyelesaian kasus KDRT dan pelecehan seksual lainnya
- 4) Optimalisasi peran perempuan dalam unit usaha milik Desa atau BUMDes. Hal ini bisa memberdayakan perempuan-perempuan yang memiliki peran ganda tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap.

2.2 Tahap Kegiatan

Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah materi dan *focus group discussion* (FGD) dengan memberikan informasi mengenai kebijakan pengarusutamaan gender kepada peserta kegiatan yang terdiri dari masyarakat dan anggota PKK Desa Panyirapan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta. Materi yang diberikan tentang pentingnya

menumbuhkan peran gender dalam pembangunan desa. Dengan Tahap Kegiatan yang dilakukan adalah: *Pertama*, Ketua dan anggota tim melakukan rapat secara *daring* untuk mendiskusikan tema pengabdian kepada masyarakat. *Kedua*, Survey ke lokasi yaitu ke Kantor Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang untuk mengurus perizinan menentukan tempat kegiatan dan waktu pelaksanaan. *Ketiga*, Diskusi dengan mitra dan Kepala Desa Panyirapan. *Keempat*, Menyiapkan kelengkapan pengabdian seperti mendesain dan mencetak spanduk, serta menyiapkan administrasi dan perlengkapan protokol kesehatan. *Kelima*, Tim pengabdian melaksanakan pengabdian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rincian pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang-Banten adalah sebagai berikut:

1. *Briefing*

Pelaksanaan *briefing* dilaksanakan di Kantor Desa Panyirapan, Kec. Baros, Kab. Serang. Sebelum acara dimulai Tim Dosen PKM melakukan *briefing* dan temu sapa dengan Kepala Desa Panyirapan, Bapak Muhidin beserta aparat desa, serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan PKM pada Kamis, 21 November 2024. Faktor pendukung: Sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan PKM sudah disediakan dan dipersiapkan oleh pihak Desa Panyirapan, Kec. Baros, Kab. Serang. Tim dosen Pengabdian Kepada Masyarakat hanya melengkapi beberapa peralatan yang belum tersedia seperti konsumsi peserta, materi, daftar hadir, pulpen, alat protokol kesehatan.

2. Registrasi Peserta

Pada hari Kamis, 21 November 2024 acara dimulai dengan registrasi diskusi pada pukul 08.00 WIB, sambil memastikan setiap peserta mendapatkan konsumsi yang telah disediakan panitia. Setelah itu peserta menempati tempat yang sudah disediakan. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 peserta, yang terdiri dari anggota PKK, Ketua RT/RW se-Desa Panyirapan, Aparat Desa, dan masyarakat. Faktor pendukung: Sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan sudah disediakan dan dipersiapkan oleh pihak Desa Panyirapan, Kec. Baros, Kab. Serang, setelah berkoordinasi dengan Tim Dosen UNPAM.

3. Pembukaan Acara

Pembukaan acara oleh MC dimulai pada pukul 08.15 WIB kemudian dilakukan pembacaan doa pembukaan, setelah itu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Faktor pendukung: Kesiapan MC dalam membawakan acara berurutan sesuai dengan alokasi waktu dan keaktifan atau antusiasme peserta Pendidikan politik.

4. Pembahasan Materi dan Diskusi

Pelaksanaan pemaparan materi berupa pendidikan politik yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber. Pemaparan materi disampaikan oleh Agisthia Lestari, S.Sos, M.Sos terkait kesadaran gender bagi anggota PKK Desa Panyirapan. Kegiatan diakhiri dengan diskusi dan pendampingan dari peserta yang mempertanyakan permasalahan-permasalahan riil. Pembahasan materi dan diskusi dilaksanakan di aula Kantor Desa Panyirapan, Kec. Baros, Kab. Serang, pada pukul 08.15 – 11.30 WIB. Faktor Pendukung: Peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti pendidikan politik. Mereka mampu memaksimalkan kegiatan ini, karena materi mengenai kesadaran gender ini dilaksanakan dengan sistem diskusi dan FGD sehingga peserta bisa bertanya dengan leluasa kepada pemateri dan materi dapat tersampaikan secara maksimal. Tidak lupa pada diskusi ini tim dosen melakukan *ice breaking* yang mampu mencairkan suasana, ditambah peran aktif moderator yang memandu kelancaran sesi materi dan tanya jawab, sehingga acara berjalan dengan kondusif

5. Penutupan, Serah Terima Plakat dan Doa Penutup

Setelah acara diskusi selesai dilanjutkan dengan pembacaan doa penutup, dan pemberian plakat dari tim dosen kepada Kepala Desa Panyirapan, serta sesi foto bersama. Acara ditutup oleh MC yang menyatakan berakhirnya diskusi ini tepat pada pukul 12.00 WIB. Alhamdulillah, kegiatan PKM berjalan dengan lancar. Faktor pendukung: Besarnya antusias peserta dan pengalaman panitia terutama pembicara, sehingga acara terlaksana cukup baik sehingga tercipta suasana kondusif. Faktor penghambat: Keterbatasan waktu pada sesi tanya jawab, masih ada beberapa peserta yang ingin bertanya, namun belum mendapat kesempatan.

6. Ramah Tamah dan Evaluasi kegiatan PKM

Pada hari Kamis, 21 November 2024 telah dilaksanakan acara ramah tamah antara Tim PKM Dosen dengan Kepala Desa dan Aparat Desa Panyirapan guna membahas peluang kelanjutan PKM berikutnya dan evaluasi dari pelaksanaan PKM yang baru saja berlalu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan PKM terlaksana dengan baik dan Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang dilaksanakan di Kantor Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang pada hari Kamis, 21 November 2024 telah berjalan lancar sesuai dengan rencana.
2. Dukungan dan sambutan positif dari masyarakat dan Kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat positif dari berbagai pihak, seperti anggota PKK, Ketua RT/RW, Aparat Desa, masyarakat umum, serta Kepala Desa Panyirapan.
3. Fasilitas dan lokasi mendukung kelancaran kegiatan Pelaksanaan kegiatan didukung oleh sarana, prasarana, dan akomodasi yang memadai, sehingga menunjang efektivitas penyampaian materi dan partisipasi peserta.
4. Antusiasme peserta sangat tinggi dan Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik dalam sesi penyuluhan, diskusi, maupun praktik yang diberikan.
5. Terjalannya sinergi positif antara pihak desa dan perguruan tinggi Kegiatan ini berhasil menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis dan sinergis antara Desa Panyirapan dan Universitas Pamulang Kampus Serang, khususnya antara tim dosen PKM dan masyarakat peserta kegiatan.

B. SARAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut beberapa saran yang dapat kami sampaikan, yaitu:

1. Anggota PKK Desa Panyirapan mampu lebih berprespektif gender dalam melihat masalah-masalah sosial sehingga mampu menumbuhkan kesadaran bukan hanya pada anggota tetapi seluruh masyarakat Desa Panyirapan demi membangun desa inklusif
2. Anggota PKK Desa Panyirapan mampu lebih berani untuk mengambil peran-peran strategis dalam perencanaan pembangunan sehingga pembangunan desa mampu mengakomodir kebutuhan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali moune-Lutz, M. and Gillivray, M. (2007). *“Gender inequality and growth: Evidence from Sub-Saharan Africa and Arab countries”*. African Development Review. 21(2): 224-242
- Brett. A., 1991, *Why Gender is A Development?*, dalam *Buku Changing Perceptions: Writing on Gender and Development*, Tina Wallace (ed.), London.
- Faqih, Mansour. 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-Hak Perempuan. Relasi Gender*. Jakarta: Teraju.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang: Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- Ismail, Kristina, et all. 2020. *Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (Studi Implementasi Kebijakan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang)*. Jurnal Moderat Volume 6, Nomor 4.
- Kamla. 1996. *Pengantar Menggugat Patriarkhi, tentang Persoalan Dominasi Perempuan Terhadap Kaum Perempuan*. Jakarta: Benteng Budaya
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012; Modul Pelatihan Fasilitator, Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pusat Statistik. (2010). *Ketimpangan Gender dalam Pencapaian Kualitas Hidup Manusia di Indonesia*. Jakarta.
- Martiany, Dina, 2012, *Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)*. Jurnal Aspirasi, Vol. 2 No. 2
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2010: Tentang Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2014: Tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2023: Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
- Rahayu, Wewen Kusumi. 2016. *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik. Vol. 2 No. 1
- Takzia, Ayyisa, et all. 2022. *Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. XVIII No. 1
- World Bank. (2012). *Gender and Development in East and South Asia*. Washington, DC:World Bank.